

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Perilaku Pemilih**

Studi tentang perilaku memilih merupakan studi mengenai alasan dan faktor yang menyebabkan seseorang memilih suatu partai atau kandidat yang ikut dalam kontestasi politik. Perilaku memilih baik sebagai konstituen maupun masyarakat umum di sini dipahami sebagai bagian dari konsep partisipasi politik rakyat dalam sistem perpolitikan yang cenderung demokratis. Menurut Firmanzah (Efriza,2012:480) secara garis besar, pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian dimanifestasikan dalam institusi politik seperti parpol.

Secara teoritis, perilaku pemilih dapat diurai dalam tiga pendekatan utama, masing-masing pendekatan sosiologi, psikologi, dan pilihan rasional. Pendekatan sosiologi, pendekatan ini lahir dari buah penelitian Sosiolog, Paul F. Lazarsfeld dan rekan sekerjanya Bernard Berelson dan Hazel Gaudet dari Columbia University.

Karenanya model ini juga disebut Mazhab Columbia (Columbia School). (Dieter Roth, 2008).

Menurut teori ini, setiap manusia terikat didalam berbagai lingkaran sosial, setiap manusia terikat di dalam berbagai lingkaran sosial, contohnya keluarga, lingkaran rekan-rekan, tempat kerja dsb. Lazeersfeld menerapkan cara pikir ini kepada pemilih. Seorang pemilih hidup dalam konteks tertentu : status ekonominya, agamanya, tempat tinggalnya, pekerjaannya dan usianya mendefinisikan lingkaran sosial yang mempengaruhi keputusan sang pemilih. Setiap lingkaran sosial memiliki normanya sendiri, kepatuhan terhadap norma-norma tersebut menghasilkan integrasi.

Namun konteks ini turut mengontrol perilaku individu dengan cara memberikan tekanan agar sang individu menyesuaikan diri, sebab pada dasarnya setiap orang ingin hidup dengan tentram, tanpa bersitegang dengan lingkungan sosialnya. (Dieter Roth, 2008).

Saiful Mujani, R. William Liddle dan Kuskridho Ambardi dalam bukunya Kuasa Rakyat (2012), menjelaskan bahwa faktor agama menjadi hal yang dipercaya sangat berpengaruh dalam konteks pendekatan sosiologis.

Selain pendekatan Sosiologis, pendekatan Psikologis juga bisa digunakan dalam menganalisa perilaku pemilih dalam pemilihan kepala desa. Meski begitu, pendekatan ini tidak dominan dibanding pendekatan Sosiologis.

Dalam bukunya, Dieter Roth (2012) menjelaskan bahwa pendekatan sosial psikologis berusaha untuk menerangkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pemilu jangka pendek atau keputusan yang diambil dalam waktu yang singkat. Hal ini berusaha dijelaskan melalui trias determinan, yakni identifikasi partai,

orientasi kandidat dan orientasi isu/utama. Inti dasar pemikiran ini dituangkan dalam bentuk sebuah variabel yakni identifikasi partai (*party identification*).

Dalam pendekatan yang sama, Saiful Mujani, R. William Liddle dan Kuskridho Ambardi dalam bukunya *Kuasa Rakyat* (2012) menjelaskan bahwa seorang warga berpartisipasi dalam Pemilu atau Pilpres bukan saja karena kondisinya lebih baik secara sosial ekonomi, atau karena berada dalam jaringan sosial, akan tetapi karena ia tertarik dengan politik, punya perasaan dekat dengan partai tertentu (identitas partai), punya cukup informasi untuk menentukan pilihan, merasa suaranya berarti, serta percaya bahwa pilihannya dapat ikut memperbaiki keadaan (*political efficacy*).

Namun kritik terhadap dua pendekatan di atas, muncul kemudian dengan asumsi pemilih bukan wayang yang tidak memiliki kehendak bebas dari kemauan dalangnya oleh Anthony Downs dalam *Economic Theory of Democracy* (1957). Artinya, peristiwa-peristiwa politik tertentu dapat mengubah preferensi pilihan seseorang.

Dalam pendekatan pilihan rasional ini, dipaparkan dua orientasi yang menjadi daya tarik pemilih, yaitu orientasi isu dan kandidat. Orientasi isu berpusat pada pertanyaan; apa yang seharusnya dan sebaiknya dilakukan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat? Dan orientasi kandidat mengacu pada sikap seseorang terhadap pribadi kandidat tanpa mempedulikan label partainya. Di sinilah para pemilih menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan rasional.

Namun terkadang pula para pemilih rasional yang bisa dikatakan sebagai free rider tidak peduli terhadap pemilihan umum, hal ini rasional secara ekonomi. Sebab utamanya adalah usaha yang diperlukan untuk mendapatkan informasi politik tidak

sebanding dengan imbalannya (Anthony Downs: *An Economic Theory of Democracy*). Apa arti satu suara dalam pemilihan dengan seratus juta suara. Kemungkinan satu suara tersebut untuk mempengaruhi hasil pemilihan sangatlah kecil.

Berbagai penelitian menyimpulkan bahwa pemilih menggunakan hak suaranya tanpa harapan yang rasional untuk mengubah hasil. Yang dia dapatkan adalah imbalan emosional. Mungkin kebanggaan karena dengan memilih dia menjalankan tugasnya sebagai warga negara. Atau perasaan bahagia karena sudah berusaha membantu rakyat miskin dengan program yang dipilihnya. Apakah program tersebut terlaksana atau tidak sangat kecil hubungannya dengan suara pemilih tersebut. Dan resiko (baik atau buruk) yang ditanggung oleh si pemilih atas pilihannya biasanya sangat kecil.

Mencari informasi politik itu mahal dan perlu usaha besar. Karena itu pemilih cenderung tidak melakukannya. Ini adalah apa yang disebut oleh Gordon Tullock (*Public Choice Theory*) sebagai *rational ignorance* (Bryan Caplan ; 2007, *The Myth of Rational Voter*). Pemilih sebenarnya tidak selalu rasional dalam menyalurkan suaranya. Mereka tidak mempunyai pemahaman yang benar terhadap berbagai topik (terutama ekonomi) yang sering diusung oleh kandidat.

Usaha untuk menambah pemahaman tentang kandidat memerlukan waktu dan juga pemikiran, bahkan terkadang biaya. Sementara keputusan yang berdasarkan emosi bisa dibilang gratis. Ini salah satu sebab hasil Pemilu tidak selalu mewakili kepentingan rasional pemilih. Sebab lain adalah karena sistem suara terbanyak tidak

selalu bisa mewakili kepentingan sosial yang merupakan agregasi dari berbagai kepentingan individu (*Kenneth Arrow's Impossibility Theorem*).

*“Non voters think it's not worth their while to physically go through the process of voting because their votes won't make any difference, statistically speaking. Some of them don't vote because they want to make informed decisions and the cost to get and process that information is more than the expected benefit. On the other hand, most people who vote are politically ignorant. But this is done rationally. They choose to be ignorant because to be politically informed takes effort. They still go to voting booth because they get rewarded by feeling good having done their civic duty, trying to save the environment, helping the poor or whatever. That feeling is a reward, but not a big reward. So they spend some effort, but not that much that they become well informed. If the reward is bigger they'll probably be more informed.”*

Apakah ini berarti demokrasi gagal? Bukan gagal, hanya tidak sempurna. Seperti dikatakan Churchill,

*“Democracy is the worst form of government, except for all those other forms that have been tried from time to time.”*

Karena manusia ini makhluk rasional, maka ketidakpedulian-nya-pun harus dirasionalisasi. Jadi pemilih tidak akan mengakui bahwa mereka tidak tahu banyak tentang kandidat, tapi cenderung mengaku sudah lebih tahu. Bahkan mereka merasa ketidakpedulian itu suatu kebaikan, misalnya dengan menganggap bahwa politik itu kotor.

*Joko J. Prihatmoko (2005 ; 46)* menjelaskan bahwa pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasi dalam institusi

politik seperti partai politik. Di samping itu, pemilih merupakan bagian masyarakat luas yang bisa saja tidak menjadi konstituen partai politik tertentu. Masyarakat terdiri dari beragam kelompok. Terdapat kelompok masyarakat yang memang non-partisan, di mana ideologi dan tujuan politik mereka tidak dikatakan kepada suatu partai politik tertentu. Mereka 'menunggu' sampai ada suatu partai politik yang bisa menawarkan program politik yang bisa menawarkan program kerja yang terbaik menurut mereka, sehingga partai tersebutlah yang akan mereka pilih.

*Prof. Miriam Budiarjo (2008;136)* mendefinisikan perilaku pemilih sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau (*lobbying*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya. Perilaku memilih bisa dikategorikan ke dalam dua besaran, yaitu:

1. Perilaku Memilih Rasional Perilaku memilih ini, notabane disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari internal pemilih. Sehingga pemilih, disini berkedudukan sebagai makhluk yang independen, memiliki hak bebas untuk menentukan memilih partai atau kandidat mana pun. Dan sebagian besar mereka berasal dari internal pemilih sendiri, hasil berpikir dan penilaian terhadap objek politik tertentu.

## 2. Perilaku Memilih Emosional

Sementara untuk perilaku memilih ini, lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari lingkungan. Seperti factor sosiologis, struktursosial, ekologi maupun sosiopsikologi.

Perilaku pemilih dan partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson merupakan dua hal tidak dapat dipisahkan (1990;127). Partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Salah satu wujud dari partisipasi politik ialah kegiatan pemilihan yang mencakup suara, sumbangan- sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil proses pemilihan.

Sementara itu menurut Surbakti perilaku pemilih adalah aktifitas pemberian suara oleh individu yang berkaiatan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih dan tidak memilih didalam suatu pemilu maka voters akan memilih atau mendukung kandidat tertentu. (1997;105)

Selanjutnya menurut Firmanzah (2007;89), ada tiga faktor determinan bagi pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi pertimbangan pemilih, yakni: *Pertama*, Kondisi awal pemilih, ini dimaksudkan bahwa karakteristik yang melekat dalam diri pemilih. Setiap individu memiliki sistem nilai, keyakinan dan kepercayaan yang berbeda-beda dan mewarisi kemampuan yang berbeda-beda pula. Kondisi ini jelas sangat mempengaruhi individu

ketika mengambil keputusan politik. *Kedua*, faktor media massa yang mempengaruhi opini publik. Media massa yang memuat data, informasi dan berita berperan penting dalam mempengaruhi opini dimasyarakat. Demikian pula dengan pemaparan para ahli, iklan politik, hasil seminar, survey dan berbagai hal yang diulas dalam media massa akan menjadi pertimbangan pemilih. *Ketiga*, Faktor parpol atau kontestan, pemilih akan menilai latar belakang, reputasi, citra, ideologi dan kualitas para tokoh-tokoh parpol dengan pandangan mereka masing-masing. Dalam hal ini masyarakat lebih sering melakukan penilaian terhadap figur tokoh parpol, sekaligus menjadi barometer mereka dalam menilai parpol yang bersangkutan.

Dalam pembahasan perilaku pemilih, menurut Dieter Roth (2009) menyebutkan bahwa apabila kita membicarakan teori perilaku pemilih, maka tidak ada satu teori yang benar, karena juga tidak ada hanya satu teori mengenai perilaku manusia pada umumnya. (<http://politik.kompasiana.com/2011/04/13/perilaku-pemilih-di-kota-yogyakarta-fenomena-pemilu-2004-dan-2009/>)

Ada tiga teori besar yang menjelaskan mengapa seseorang tidak memilih ditinjau dari sudut pemilih ini adalah sebagai berikut : Pertama, teori sosiologis. Seseorang tidak ikut dalam pemilihan dijelaskan sebagai akibat dari latar belakang sosiologis tertentu, seperti agama, pendidikan, pekerjaan, ras dan sebagainya. Faktor jenis pekerjaan juga dinilai bisa mempengaruhi keputusan orang ikut pemilihan atau tidak.

Kedua, teori psikologis. Keputusan seseorang untuk ikut memilih atau tidak ditentukan oleh kedekatan dengan partai atau kandidat yang maju dalam pemilihan.

Makin dekat seseorang dengan partai atau kandidat tertentu makin besar kemungkinan seseorang terlibat dalam pemilihan.

Ketiga, teori sosial ekonomi. Teori ini menyatakan keputusan untuk memilih atau tidak dilandasi oleh pertimbangan rasional, seperti ketidakpercayaan dengan pemilihan yang bisa membawa perubahan lebih baik. Atau ketidakpercayaan masalah akan bisa diselesaikan jika pemimpin baru terpilih, dan sebagainya. Pemilih yang tidak percaya dengan pemilihan akan menciptakan keadaan lebih baik, cenderung untuk tidak ikut memilih.

Untuk mengkaji mengenai perilaku pemilih dalam menjatuhkan pilihannya pada partai tertentu dalam ilmu politik terdapat dua mazhab yang dominan menurut Afan Gaffar, yaitu : Mazhab Columbia dan Mazhab Michigan. Mazhab Columbia dikenal sebagai pendekatan sosiologis, dan mazhab Michigan dikenal dengan pendekatan sosio-psikologis. (Afan Gaffar, 1992 : 4 ).

Pendekatan sosiologis ini dipelopori dan dikembangkan oleh sejumlah ilmuwan ilmu sosial dan ilmu politik dari Columbia's University Bureau Of Applied Social Science, sehingga terkenal dengan mashab Colombia (*The Columbia School of Electoral Behavior*). Kedua teori perilaku pemilih psikologis. Pendekatan ini dipelopori dan dikembangkan oleh sejumlah ilmuwan dari University of Michigan's Survey Research Center, sehingga dalam teorisasi perilaku pemilih dikenal dengan mashab Michigan's. (Dewi Erowati dalam Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, Volume 2/Nomor 2/Desember 2004).

Pendekatan sosiologis berasal dari Eropa Barat yang dikembangkan oleh para ahli politik dan sosiologi. Mereka memandang masyarakat sebagai sesuatu yang

bersifat hirarkis terutama berdasarkan status, karena masyarakat secara keseluruhan merupakan kelompok orang yang mempunyai kesadaran status yang kuat. Mereka percaya bahwa masyarakat sudah tertata sedemikian rupa sesuai dengan latar belakang dan karakteristik sosialnya, maka memahami karakteristik sosial tersebut merupakan sesuatu yang penting dalam memahami perilaku politik individu. (Afan Gaffar, 1992 : 4-5).

Perilaku pemilih dari pendekatan sosiologis tersebut dipengaruhi oleh indikator sebagai berikut : (a) pendidikan, (b) jabatan / pekerjaan, (c) jenis kelamin, (d) Usia. (Afan Gaffar, 1992 : 5). Menurut Seymour M. Lipset, yang dikutip Alwis (2001), karakteristik sosiologis pemilih dipengaruhi oleh beberapa kategori, yakni : pendapatan, pendidikan, pekerjaan, ras, jenis kelamin, umur, tempat tinggal, situasi, status dan organisasi, (Alwis, Jurnal Laboratorium Ilmu Pemerintahan Universitas Riau)

Menurut hasil penelitian yang pernah mereka lakukan, bahwa status sosial ekonomi (pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan kelas sosial si pemilih), tempat tinggal (rural atau urban) memiliki hubungan yang sangat kuat dengan perilaku pemilih. Dengan demikian, teori perilaku pemilih sosiologis atau mashab Columbia menekankan bahwa faktor-faktor sosiologis memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku memilih seseorang atau sekelompok orang.

Sedangkan teori perilaku pemilih psikologis atau mashab Michigan's lebih menekankan bahwa perilaku memilih seseorang atau sekelompok orang dipengaruhi oleh relasi tiga aspek psikologis antara manusia dengan aspek-aspek pemilu antara lain :

- 1) Keterkaitan seseorang dengan partai politik,
- 2) Orientasi seseorang terhadap issue-isue,
- 3) Orientasi seseorang terhadap kandidat.

Dengan demikian, partai politik, isu dan kandidat merupakan variabel independen dalam menjelaskan perilaku pemilih dalam suatu pemilu. (Dewi Erowati: 2004 : Volume 2).

Ilmuwan Dennis Kavanagh dalam teorinya mengungkapkan ada lima pendekatan untuk menganalisis tingkah laku pemilih dalam suatu pemilu. Kelima pendekatan itu meliputi: (1) Pendekatan struktural, (2) Pendekatan sosiologis, (3) Pendekatan ekologis, (4) Pendekatan psikologis-sosial dan (5) Pendekatan rasional. (Efriza, 2012 :482).

Para pemilih juga dikelompokkan menjadi empat segmen berdasarkan perilaku. Keempat segmen ini dikembangkan oleh Newman sebagai bagian dari *political marketing* yang bertujuan memenangkan Bill Clinton menjadi Presiden Amerika Serikat yang kedua kalinya tahun 1996. (Adman Nursal, 2004:126)

1. Segmen pemilih rasional, kelompok pemilih ini memfokuskan perhatian pada faktor isu dan kebijakan kontestan dan menentukan pilihan politiknya.
2. Segmen pemilih emosional, kelompok yang dipengaruhi oleh perasaan-perasaan tertentu seperti kesedihan, kekhawatiran, dan kegembiraan terhadap harapan tertentu dalam menentukan pilihan politiknya. Faktor emosional ini sangat ditentukan oleh faktor personalitas kandidat.

3. Segmen pemilih sosial, kelompok yang mengasosiasikan kontestan pemilu dengan kelompok-kelompok sosial tertentu dalam menentukan pilihan politiknya.
4. Segmen pemilih situasional, kelompok pemilih yang dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional tertentu dan menentukan pilihannya. Segmen ini digerakkan oleh perubahan dan akan menggeser pilihan politik jika terjadinya kondisi-kondisi tertentu.

Sedangkan menurut *Eep Saifullah Fatah* dalam buku *political explorer* (Efriza, 2012 : 487), secara umum pemilih dikategorikan kedalam empat kelompok utama, yaitu:

1. *Pemilih Rasional Kalkulatif*, pemilih tipe ini adalah pemilih yang memutuskan pilihan politiknya berdasarkan perhitungan rasional dan logika. Biasanya pemilih ini berasal dari golongan masyarakat yang terdidik atau relatif tercerahkan dengan informasi yang cukup sebelum menjatuhkan pilihannya.
2. *Pemilih Primordial*, pemilih yang menjatuhkan pilihannya lebih dikarenakan alasan primordialisme. Seperti alasan agama, suku, ataupun keturunan. Pemilih yang termasuk kedalam tipe ini biasanya sangat mengganggu simbol-simbol yang mereka anggap luhur. Pemilih tipe ini lebih banyak berdomisili diperkampungan.
3. *Pemilih pragmatis*, pemilih tipe ini biasanya lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan untung dan rugi. Suara mereka akan diberikan kepada kandidat yang bisa mendatangkan keuntungan sesaat secara pribadi kepada mereka.

Biasanya mereka juga tidak begitu peduli dan sama sekali tidak kritis dengan integritas dan visi misi yang dibawa kandidat.

4. *Pemilih emosional*, kelompok pemilih ini cenderung memutuskan pilihan politiknya karena alasan perasaan. Pilihan politik yang didasari rasa iba, misalnya adalah pilihan yang emosional. Atau pilihan dengan alasan romantisme, seperti kagum dengan ketampanan atau kecantikan kandidat, misalnya juga termasuk kategori pilihan emosional. Kebanyakan mereka biasanya berasal dari kalangan hawa/ atau pemilih pemula.

Ditengah masyarakat, individu berperilaku dan berinteraksi, sebagian dari perilaku dan interaksi dapat ditandai akan berupa perilaku politik, yaitu perilaku yang bersangkutan paut dengan proses politik. Sebagian lainnya berupa perilaku ekonomi, keluarga, agama, dan budaya. Termasuk kedalam kategori ekonomi, yakni kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, menjual dan membeli barang dan jasa, mengkonsumsi barang dan jasa, menukar, menanam, dan menspekulasikan modal. Namun, hendaklah diketahui pula tidak semua individu ataupun kelompok masyarakat mengerjakan kegiatan politik. (Ramlan Surbakti : 1992 : 15)

*Memilih* ialah suatu aktifitas yang merupakan proses menentukan sesuatu yang dianggap cocok dan sesuai dengan keinginan seseorang atau kelompok, baik yang bersifat eksklusif maupun yang inklusif.

Memilih merupakan aktifitas menentukan keputusan secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Surbakti (1992) menilai perilaku memilih ialah keikutsertaan warga Negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan

membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum

Perilaku pemilih merupakan realitas sosial politik yang tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal dan internal. Secara eksternal perilaku politik merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari lingkungannya, sedangkan secara internal merupakan tindakan yang didasarkan atas rasionalitas berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih. Misalnya saja isu-isu dan kebijakan politik, tetapi pula sekelompok orang yang memilih kandidat karena dianggap representasi dari agama atau keyakinannya, sementara kelompok lainnya memilih kandidat politik tertentu karena dianggap representasi dari kelas sosialnya bahkan ada juga kelompok yang memilih sebagai ekspresi dari sikap loyal pada ketokohan figur tertentu. Sehingga yang paling mendasar dalam mempengaruhi perilaku pemilih antara lain pengaruh elit, identifikasi kepartaian sistem sosial, media massa dan aliran politik.

### **1. Pendekatan Sosiologis**

Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih. Pengelompokan sosial ini misalnya berdasarkan umur (tua-muda), jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), agama dan sebagainya, dianggap mempunyai peranan cukup menentukan dalam membentuk perilaku

pemilih. Untuk itu, pemahaman terhadap pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang didalam organisasi keagamaan, organisasi profesi, kelompok-kelompok okupasi dan sebagainya, maupun kelompok informal seperti keluarga, pertemanan, ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya. Ini merupakan sesuatu yang vital dalam memahami perilaku politik, karena kelompok-kelompok ini mempunyai peranan besar dalam bentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang. Jadi bisa dikatakan bahwa keanggotaan seseorang kepada kelompok-kelompok sosial tertentu dapat mempengaruhi seseorang didalam menentukan pilihnya pada saat pemilu. Hal ini tidak terlepas dari seringnya anggota kelompok, organisasi profesi dan kelompok okupasi berinteraksi satu sama lain sehingga timbulnya pemikiran-pemikiran untuk mendukung salah satu dari caleg yang mengikuti pemilu.

Gerald Pomper merinci pengaruh pengelompokan sosial dalam kajian *voting behavior* ke dalam 2 variabel yaitu predisposisi (kecendrungan) sosial ekonomi pemilih dan keluarga pemilih. Apakah preferensi politik ayah atau ibu akan berpengaruh pada preferensi politik anak, sedangkan predisposisi sosial ekonomi berupa agama yang dianut, tempat tinggal, kelas sosial, karakteristik demografis dan sebagainya. (A.Rahman Zainuddin : 2006 : 47-48).

Hubungan antara agama dengan perilaku pemilih nampaknya sangat mempengaruhi dimana nilai-nilai agama selalu hadir didalam kehidupan *private* dan *public* dianggap berpengaruh terhadap kehidupan politik dan pribadi para pemilih. Di kalangan partai politik, agama dapat melahirkan dukungan politik dari pemilih atas

dasar kesamaan teologis, ideologis, solidaritas dan emosional. Fenomena partai yang berbasis agama dianggap menjadi daya tarik kuat dalam preferensi politik.

Dalam literatur perilaku pemilih, aspek agama menjadi pengamatan yang penting. Pemilih cenderung untuk memilih partai agama tertentu yang sesuai dengan agama yang dianut. Di Indonesia faktor agama masih dianggap penting untuk sebahagian besar masyarakat. Dikutip Sulhardi (April 2008), Misalnya seorang muslim cenderung untuk memilih partai yang berbasis Islam dan sebaliknya seorang non-muslim cenderung untuk memilih partai non-muslim.

## **2. Pendekatan psikologis**

Psikologi adalah ilmu sifat, dimana fungsi-fungsi dan fenomena pikiran manusia dipelajari. Setiap tingkah laku dan aktivitas masyarakat dipengaruhi oleh akal individu. Sedangkan ilmu politik mempelajari aspek tingkah laku masyarakat umum sehingga ilmu politik berhubungan sangat dekat dengan psikologi. (Sulhardi :2008)

Pendekatan ini muncul merupakan reaksi atas ketidakpuasan mereka terhadap pendekatan sosiologis. Secara metodologis, pendekatan sosiologis dianggap sulit diukur, seperti bagaimana mengukur secara tepat sejumlah indikator kelas sosial, tingkat pendidikan, agama, dan sebagainya. Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi terutama konsep sikap dan sosialisasi untuk memperjelaskan perilaku pemilih. Disini para pemilih menentukan pilihannya karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari

proses sosialisasi, artinya sikap seseorang merupakan refleksi dari kepribadian dan merupakan variabel yang menentukan dalam mempengaruhi perilaku politiknya.

Pendekatan psikologis menganggap sikap sebagai variabel utama dalam menjelaskan perilaku politik. Hal ini disebabkan oleh fungsi sikap itu sendiri, menurut Greenstein ada 3 yakni:

1. Sikap merupakan fungsi kepentingan, artinya penilaian terhadap objek diberikan berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut.
2. Sikap merupakan fungsi penyesuaian diri, artinya seseorang bersikap tertentu sesuai dengan keinginan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang diseganiya atau kelompok panutan.
3. Sikap merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri, artinya sikap seseorang itu merupakan upaya untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan dan eksternalisasi diri.

Namun, sikap bukanlah sesuatu hal yang cepat terjadi, tetapi terbentuk melalui proses yang panjang, yakni mulai dari lahir sampai dewasa. *Pada tahap pertama*, informasi pembentukan sikap berkembang dari masa anak-anak. Pada fase ini, keluarga merupakan tempat proses belajar. Anak-anak belajar dari orangtua menganggap isu politik dan sebagainya. *Pada tahap kedua*, adalah bagaimana sikap politik dibentuk pada saat dewasa ketika menghadapi situasi di luar keluarga. *Tahap ketiga*, bagaimana sikap politik dibentuk oleh kelompok-kelompok acuan seperti pekerjaan, gereja, partai politik dan asosiasi lain.

Melalui proses sosialisasi ini individu dapat mengenali sistem politik yang kemudian menentukan sifat persepsi politiknya serta reaksinya terhadap gejala-gejala politik di dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah. Sosialisasi bertujuan meningkatkan kualitas pemilih.

### **3. Pendekatan Pilihan Rasional**

Dua pendekatan terdahulu secara implisit atau eksplisit menempatkan pemilih pada waktu dan ruang kosong. Dimana pendekatan tersebut beranggapan bahwa perilaku pemilih bukanlah keputusan yang dibuat pada saat menjelang atau ketika berada dibalik suara, tetapi sudah ditentukan jauh sebelumnya, bahkan jauh sebelum kampanye dimulai. Karakteristik sosiologis, latar belakang keluarga, pembelahan kultural, identifikasi partai melalui proses sosialisasi, pengalaman hidup, merupakan variabel yang secara sendiri-sendiri mempengaruhi perilaku politik seseorang. Ini berarti variabel lain menentukan atau ikut menentukan dalam mempengaruhi perilaku pemilih. Ada faktor situasional yang ikut mempengaruhi pilihan politik seseorang. Dengan begitu para pemilih bukan hanya pasif tetapi juga aktif, bukan hanya terbelenggu oleh karakteristik sosiologis tetapi bebas untuk bertindak. Faktor situasional ini bisa berupa isu-isu politik pada kandidat yang dicalonkan.

Perilaku pemilih tidak harus tetap atau sama, karena karakteristik sosiologis dan identifikasi partai dapat berubah-ubah sesuai waktu dan peristiwa-peristiwa politik tertentu. Dengan begitu, isu-isu politik menjadi pertimbangan yang penting dimana para pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilaian terhadap isu-isu politik

dan kandidat yang diajukan. Artinya para pemilih (masyarakat) dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional. (Ibid : 50)

Pendekatan pilihan rasional mencoba menjelaskan bahwa kegiatan memilih sebagai kalkulasi untung dan rugi yang di pertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang di harapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih (Ramlan Surbakti : 1992 : 146)

Beberapa pendekatan diatas sama-sama berasumsi bahwa memilih merupakan kegiatan yang *otonom*, dalam arti tanpa desakan dan paksaan dari pihak lain. Namun, dalam kenyataan di Negara-negara berkembang perilaku memilih bukan hanya ditentukan oleh pemilih sebagaimana disebutkan oleh beberapa pendekatan diatas, tetapi dalam banyak hal justru ditentukan oleh tekanan kelompok, intimidasi, dan paksaan dari kelompok atau pemimpin tertentu.

## **B. Konsep Desa**

Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga

merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Jadi, kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/ kota diwilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usul (Hanif Nurcholis,hal 1; 2011).

Desa merupakan suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya relatif sama, dan mempunyai tatacara dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Desa dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam suatu budaya yang relatif homogen. Masyarakat desa cenderung terikat oleh kesamaan dan kesatuan sistem nilai sosial-budaya.

Dalam konteks Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, desa dibedakan dengan kelurahan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, sedangkan kelurahan adalah administrasi pemerintahan dibawah kecamatan yang merupakan wilayah pelayanan administrasi dari kabupaten/kota.

Desa yang didalamnya terdapat kesatuan masyarakat tersebut kemudian dilegalkan melalui UU No. 32 tahun 2004 yang disebut kesatuan masyarakat hukum (adat). Adapun kelurahan bukan merupakan kesatuan masyarakat hukum. Kelurahan

hanyalah wilayah pelayanan pejabat yaitu lurah, yang diberi tugas oleh Bupati/ Wali kota dibawah koordinasi camat.

Menurut Soetarjo (1984:16) menjelaskan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Sedangkan menurut Sardjono Jatiman (1995:12-13) menyatakan bahwa desa adalah merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*).

Selanjutnya menurut Ter Haar desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat dinyatakan sebagai kelompok-kelompok teratur yang bersifat ajeg dengan pemerintah sendiri yang memiliki benda-benda material maupun inmaterial.

Pemerintahan desa sebagai suatu organisasi penyelenggara pemerintahan yang terdiri dari berbagai bagian yang terstruktur jelas yang memiliki tujuan yang sama yaitu menyelenggarakan pemerintahan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah membawa perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan desa. Pemilihan kepala desa adalah sarana pelaksanaan azas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Desa sebagai pemimpin formal di desa harus dipilih secara demokratis oleh masyarakat desanya sendiri. Sifat demokratis harus ada dan dipertahankan, bukan semata-mata karena sendi-sendi kehidupan demokratis dapat menjamin

terselenggaranya pembangunan desa, akan tetapi pembangunan desa memerlukan dukungan dari masyarakat.

Menurut Sadu Wasistiono (2006 : 32) tentang pemilihan desa menyatakan bahwa apabila pemilihan umum merupakan pesta pemerintah, maka pemilihan kepala desa adalah pesta rakyat. Pemilihan desa merupakan kesempatan rakyat untuk menunjukkan kesetiaan dan preferensi lokal mereka. Pemilihan kepala desa dilakukan dalam enam tahun. Hal ini sesuai dengan pasal 204 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi : masa jabatan kepala desa 6 (enam) tahun dipilih kembali hanya (satu) kali masa jabatan berikutnya. Dengan demikian jelaslah bahwa kepala desa menjabat selaku pimpinan desa hanya 6 (enam) tahun, kemudian dapat dipilih kembali hanya untuk 1 periode berikutnya.

### **C. Konsep Demokrasi**

Demokrasi memiliki pengertian yang bermacam-macam. Demokrasi sering diartikan kebebasan. Demokrasi juga diartikan beda pendapat. Begitu banyaknya pengertian demokrasi sering membuat orang salah melaksanakannya. Dengan demikian, apa demokrasi itu? Istilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern.

Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Kata "demokrasi" berasal dari dua kata,

yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* / *cratein* yang berarti pemerintahan sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Berikut ini pengertian demokrasi menurut para ahli :

1. ***Abraham Lincoln*** berpendapat, demokrasi adalah pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat.
2. ***Kranenburg*** berpendapat, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* (rakyat) dan *cratein* (memerintah). Jadi, demokrasi adalah cara memerintah dari rakyat.
3. ***Koentjoro Poerbopranoto*** berpendapat, demokrasi adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Hal ini berarti suatu sistem di mana rakyat diikut sertakan dalam pemerintahan negara.
4. ***Harris Soche*** berpendapat, demokrasi adalah pemerintahan rakyat karena itu kekuasaan melekat pada rakyat.
5. ***Henry B. Mayo*** berpendapat, sistem politik demokratis adalah menunjukkan kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat, dan didasarkan atas kesamaan politik dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
6. ***International Commision for Jurist*** menyatakan demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan untuk membuat keputusan politik diselenggarakan oleh wakil-wakil yang dipilih bertanggung jawab kepada mereka melalui pemilihan yang bebas.

7. **C.F. Strong** menyatakan suatu sistem pemerintahan pada mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan kepada mayoritas.
8. **Samuel Huntington** menyatakan sistem politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam system itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan semua orang dewasa mempunyai hak yang sama memberikan suara.

Sebagaimana istilah politik lainnya, demokrasi merupakan salah satu yang kompleks. Helena Catt (1999) menyatakan bahwa meskipun secara luas, demokrasi dimaknai sebagai “*rule by the people*”, dalam praktiknya, artinya beragam. Para ahli menyepakati pandangan bahwa demokrasi itu sangat subjektif dan beragam (Bagchi 1995; Whitehead 2003).

Sorensen (1998) khususnya, menyatakan bahwa perdebatan tentang demokrasi telah tumbuh dan berkembang dengan menggabungkannya dengan aspek dan dimensi yang baru ketika konteks sosial – atau persepsi analis – berubah. Dia menyatakan bahwa pengalaman di banyak negara memperlihatkan bagaimana potensi untuk menekankan aspek-aspek dari demokrasi akan membawa kepada beragam definisi dari demokrasi.

Pemaknaan demokrasi yang netral dikemukakan oleh Catt (1999) sebagai sebuah metoda ideal dalam pengambilan keputusan. Lebih lanjut, Catt berpendapat bahwa pemaknaan seperti inilah yang mengakibatkan demokrasi diterima secara universal. Sebagai sebuah metode, demokrasi dapat diterapkan di organisasi mana

pun di mana di dalamnya warga membuat keputusan-keputusan. Namun demikian, penggunaan konsep demokrasi selalu dikaitkan dengan sistem pemerintahan nasional atau daerah.

Salah satu definisi demokrasi yang mengikuti pemikiran tersebut adalah yang dikemukakan oleh Brian Barry (1992). Barry mendefinisikan demokrasi sebagai metode untuk menentukan isi dari hukum atau peraturan yang mengikat lainnya (*legally binding decisions*) yang mana preferensi warga memiliki koneksi formal outputnya dan preferensi tersebut diperhitungkan secara adil. Definisi ini menyiratkan bahwa dalam sebuah sistem demokratis, preferensi warga secara adil diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan dan terefleksi dalam hukum dan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Satu poin penting yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa dalam sebuah sistem yang demokratis (Redy & Sabelo 1997)

*“eligible people in a polity participate actively not only in determining the kind of people that govern them, but also participate actively in shaping the policy output from government”.*

Sebuah sistem pemerintahan dikategorikan sebagai demokratis tidak hanya karena secara politis responsif terhadap warga melalui pemilu yang periodik, tetapi juga karena sistem tersebut terbuka untuk partisipasi bagi kelompok-kelompok marginal atau yang ter subordinasi. Hanya melalui eksistensi dari mekanisme yang inklusif seperti inilah, apa yang disebut sebagai demokrasi procedural menjadi *participatory democracy* di mana didalamnya *“the everyday rights, interests, perspectives and involvement of civil society at large [are] taken into consideration by the powers - that -be, in between elections* (Loh 2008).

Apa yang menjustifikasi demokrasi sebagai sebuah metode ideal pengambilan keputusan? Atau, apa yang menyebabkan demokrasi lebih disukai ketimbang bentuk pemerintahan yang lainnya? Para ahli telah menjawab ini dengan jawaban-jawaban yang beragam (Beetham 1994; Dahl 1998). Pada garis besarnya, demokrasi dijustifikasi berdasar kepada prinsip-prinsip yang mendasarinya, kebaikan-kebaikannya dan juga keuntungan-keuntungan yang didapat ketika menerapkannya (Copp, Hampton & Roemer 1993; Holden 1988).

Dalam kategori yang pertama, prinsip yang mendasari demokrasi, para ahli berpendapat bahwa demokrasi lebih disukai karena menjunjung dan memfasilitasi prinsip-prinsip moral yang mendasar seperti akuntabilitas politik, persamaan politik dan kedaulatan masyarakat. Komitmen atas ketiga prinsip ini sangatlah mendasar karena berakar dari prinsip otonomi personal sebagai manusia (Ng 1997: 21). Ketiganya merupakan manifestasi dari aspirasi mendasar dari manusia atas kebebasan (Wood 2004: 3) dan kesamaan di antara sesamanya (Saward 1998: 21). Dari perspektif ini pula, diyakini demokrasi tidak terikat pada kultur tertentu (*culture-bound*).

Komitmen atas prinsip dasar ini merupakan dasar untuk penerimaan demokrasi yang mendunia. Hasil survey opini publik di negara-negara Afrika, Amerika Latin dan Asia pada tahun 2001 menunjukkan bahwa budaya barat tidak memiliki monopoli dalam memahami dan menilai demokrasi (Diamond 2003: 7). Dua per tiga negara-negara di Afrika yang disurvei memandang demokrasi berhubungan erat dengan kemerdekaan sipil, kedaulatan rakyat dan pemilu. Mereka juga menyukai

demokrasi daripada otoritarian dan percaya bahwa demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang terbaik.

Hasil yang sama juga di temukan di Amerika Latin dan Asia. Survey yang dilakukan juga menunjukkan bahwa negaranegara Muslim di Afrika, Asia Tengah dan Timur Tengah juga supportif terhadap demokrasi sebagaimana negara lainnya. Pendeknya, survey tersebut menemukan bahwa demokrasi dipandang sebagai sesuatu yang baik oleh banyak orang di seluruh dunia, terlepas latar belakang budaya mereka (Dryzek 1996: 475).

Kategori yang kedua – kebaikan yang melekat (*inherent virtues*) – memfokuskan kepada proses demokrasi itu sendiri. Proses demokrasi dipandang penting karena memiliki potensi untuk mengembangkan kapasitas individual. Holden (1988) berpendapat bahwa

*“political participation itself increases people’s confidence in their ability to participate efficiently and meaningfully in politics: participation increases their sense of ‘political efficacy’.”*

Justifikasi lainnya adalah bahwa proses demokrasi dapat meredam konflik karena memungkinkan ketidaksepakatan dan perbedaan untuk di dengar dan didiskusikan dalam suasana yang bebas dan setara, oleh karenanya mengurangi frustrasi publik dan meminimalisir konflik yang brutal. Holden lebih lanjut menjustifikasi proses demokrasi atas dasar potensinya, melalui mekanisme pemilu, untuk memfasilitasi suksesi pemimpin yang damai dan tertib. Rezim yang demokratis mampu secara lebih baik dalam menyediakan kondisi-kondisi di mana keuntungan-

keuntungan di atas dapat diwujudkan daripada rezim lain oleh karena adanya kebaikan yang melekat (*inherent virtues*).

Kategori yang ketiga – outcomes menguntungkan – menjustifikasi demokrasi dalam hal kemampuannya menyampaikan hasil yang baik seperti mereduksi konflik, kebebasan individual yang lebih besar, keputusan-keputusan yang bijak, realisasi dari kepentingan bersama, kebahagiaan yang terbesar untuk jumlah yang besar, dan berbagai kebaikan lainnya (Saward 1998). Pendapat serupa juga datang dari Mayo (Mayo 1962) yang menyatakan bahwa demokrasi terjustifikasi karena mewujudkan nilai sosial dan individu. Yang dimaksud dengan nilai sosial, Mayo merujuk kepada kemampuan demokrasi untuk memfasilitasi penanganan damai atas pertentangan, perubahan sosial dan suksesi pemimpin. Mayo juga merujuk nilai positif individu atau kualitas individu yang dipromosi oleh demokrasi, seperti independensi, rasionalitas, simpati dan toleran.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Namun dalam perkembangannya demokrasi tidak hanya sebagai bentuk pemerintahan tetapi telah menjadi sistem politik dan sikap hidup.

#### **D. Tinjauan Penelitian Terdahulu dalam Prilaku Pemilih**

Lahirnya pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan suatu langkah maju dalam proses demokratisasi di Indonesia. Berangkat dari definisi di atas maka, dapat dipahami bahwa demokrasi memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu maupun sekelompok orang untuk menjadi kepala daerah maupun

memberikan suaranya dalam pemilihan kepala daerah tanpa menghiraukan latar belakang partai maupun nonpartai, ekonomi, etnis, agama, sipil, militer dan lain sebagainya. Banyak sekali keaneragaman fenomena dari berbagai daerah yang sangat menarik untuk ditinjau dan dikaji. Karena itu, peneliti tertarik untuk meninjau penelitian terdahulu yang masih sejalan dengan penelitian yang akan diadakan yaitu berkenaan dengan perilaku pemilih.

Penelitian yang dilakukan oleh Ginanjar Muda, mahasiswa dari Universitas Sumatra Utara (Unsu) dengan judul Perilaku Pemilih dalam Pemilukada (studi kasus: Etnis Karo di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo 2010. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah Karo merupakan salah satu Pemilihan Umum Kepala Daerah yang terselenggara secara dua putaran dari berbagai Pemilihan Umum Kepala Daerah yang pernah terlaksana di Negara Republik Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru. Namun ada suatu keunikan tersendiri pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Karo yaitu pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pada pemilihan putaran pertama mendapatkan suara terbanyak kemudian kalah pada pemilihan putaran kedua.

Fenomena politik yang terjadi di Kabupaten Karo dapat kita analisis dengan menggunakan pendekatan perilaku atau untuk lebih tepatnya perilaku pemilih. Perilaku pemilih adalah kompleks dan selalu berubah-ubah. Secara umum menurut para ahli perilaku pemilih dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor sosiologis, faktor psikologis dan faktor pilihan rasional.

Bagaimana dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah Karo tahun 2010? Mengapa calon yang pada pemilihan putaran pertama mendapatkan suara terbanyak ternyata kalah pada pemilihan putaran kedua? Faktor apa yang paling mempengaruhi pemilih Etnis Karo pada Pemilihan Umum Kepala Daerah tersebut mengingat Etnis Karo adalah etnis mayoritas yang sudah barang tentu suaranya akan mempengaruhi hasil pemilihan. Agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul, kemudian dilakukan penelitian di salah satu desa yang ada di Kabupaten Karo yaitu Desa Ketaren. Desa Ketaren dipilih sebagai lokasi penelitian karena secara umum desa ini memiliki karakteristik Kabupaten Karo secara keseluruhan.

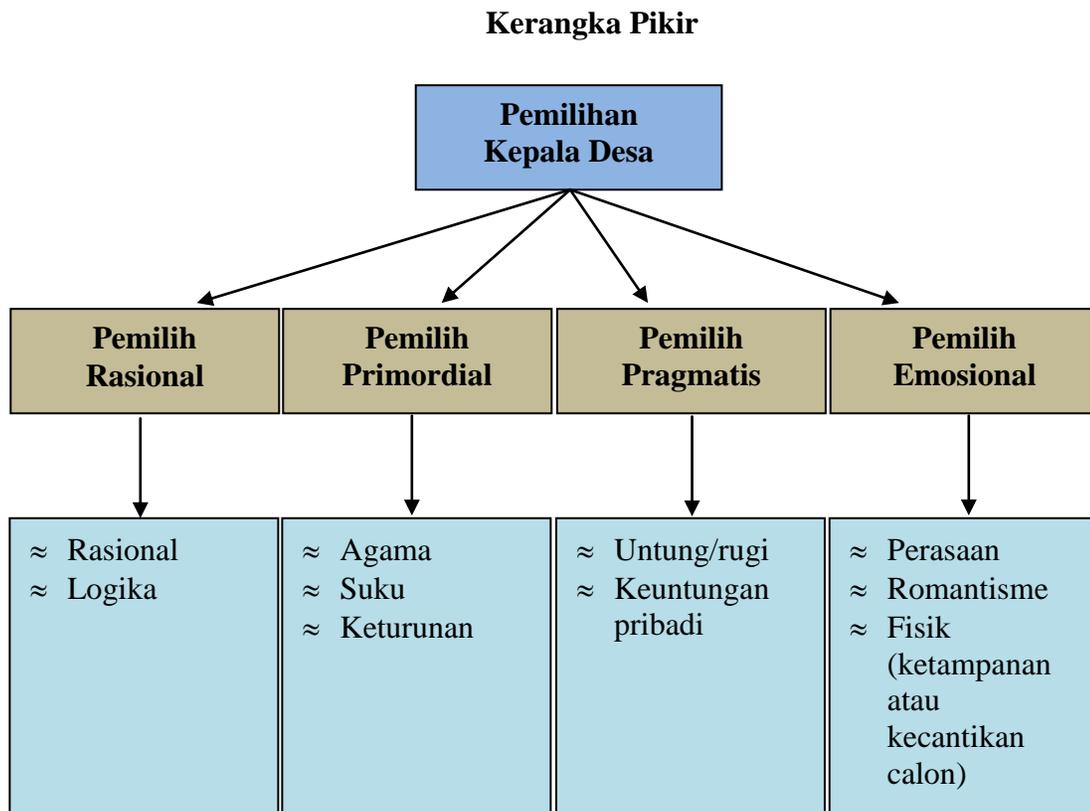
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tri Setya Puspasari dari Universitas Sultan Ageng Serang, dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah propinsi Banten tahun 2011 di kecamatan Karawachi kota Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kandidat mempunyai pengaruh tertinggi dalam perilaku pemilih, karena pemilih melihat kandidat dari citra suatu kandidat. Faktor lain adalah social imagery, berpengaruh terhadap faktor pemilih tapi masih tergolong rendah, karena banyak pemilih yang tidak mengetahui program kandidat. Faktor peristiwa tertentu mempunyai pengaruh yang rendah. Dan faktor epitesmi juga mempunyai pengaruh yang rendah karena tidak semua pemilih tertarik dengan wajah baru kandidat.

#### **E. Kerangka Pikir**

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, merujuk pada hal yang dikembangkan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Sedangkan menurut *Eep*

*Saifullah Fatah*, secara umum pemilih dikategorikan kedalam empat kelompok utama, yaitu:

1. *Pemilih Rasional Kalkulatif*, pemilih tipe ini adalah pemilih yang memutuskan pilihan politiknya berdasarkan perhitungan rasional dan logika. Biasanya pemilih ini berasal dari golongan masyarakat yang terdidik atau relatif tercerahkan dengan informasi yang cukup sebelum menjatuhkan pilihannya.
2. *Pemilih Primordial*, pemilih yang menjatuhkan pilihannya lebih dikarenakan alasan primordialisme. Seperti alasan agama, suku, ataupun keturunan. Pemilih yang termasuk kedalam tipe ini biasanya sangat mengganggu simbol-simbol yang mereka anggap luhur. Pemilih tipe ini lebih banyak berdomisili diperkampungan.
3. *Pemilih pragmatis*, pemilih tipe ini biasanya lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan untung dan rugi. Suara mereka akan diberikan kepada kandidat yang bisa mendatangkan keuntungan sesaat secara pribadi kepada mereka. Biasanya mereka juga tidak begitu peduli dan sama sekali tidak kritis dengan integritas dan visi misi yang dibawa kandidat.
4. *Pemilih emosional*, kelompok pemilih ini cenderung memutuskan pilihan politiknya karena alasan perasaan. Pilihan politik yang didasari rasa iba, misalnya adalah pilihan yang emosional. Atau pilihan dengan alasan romantisme, seperti kagum dengan ketampanan atau kecantikan kandidat, misalnya juga termasuk kategori pilihan emosional. Kebanyakan mereka biasanya berasal dari kalangan hawa/ atau pemilih pemula.



Peneliti menganggap bahwa konsep yang dikembangkan oleh *Eep Saifullah Fatah* tepat dijadikan konsep teori yang akan dipakai dalam penelitian ini. Karena melihat karakteristik masyarakat desa Bumi Kencana Kecamatan seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dan dipadukan dengan teori tersebut. Dan peneliti anggap sangat relevan dengan kondisi masyarakat desa tersebut. Dimana teori tersebut tepat untuk menggambarkan kondisi masyarakat terutama bagi para pemilih. Diharapkan dengan teori ini peneliti dapat mendapatkan gambaran secara umum mengenai kondisi para pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa khususnya di Desa Bumi Kencana. Dengan penelitian ini akan digambarkan oleh peneliti melalui hasil

penelitian, apakah para pemilih di desa ini merupakan pemilih yang Rasional, pemilih Primordial, pemilih Pragmatis atau pemilih Emisional.